



**PENGARUH UPAH MINIMUM, PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB), DAN INVESTASI PMDN TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

**Muhammad Yasin
NIM 140810101063**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENGARUH UPAH MINIMUM, PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB), DAN INVESTASI PMDN TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Muhammad Yasin
NIM 140810101063

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Sahyati dan Ayahanda Kuswanto tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Saudaraku Siti Nur Azizah, Ahmad Sandi Arif, Supriyadi, yang telah menjadi salah satu penyemangat bagi penulis.
3. Guru-guru sekolahku dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, serta guru-guru tercintaku yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya”
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 5)

“Bahagia bukan milik dia yang hebat dalam segalanya, namun dia yang mampu
temukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur”
(Anonim)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yasin

NIM : 140810101063

Judul : Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Investasi PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang benar.

Demikian pernyataan yang saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jember, 30 Oktober 2018

Yang Menyatakan,

Muhammad Yasin
NIM. 140810101063

SKRIPSI

**PENGARUH UPAH MINIMUM, PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB), DAN INVESTASI PMDN TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh

Muhammad Yasin
NIM 140810101063

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Investasi PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur

Nama Mahasiswa : Muhammad Yasin
NIM : 140810101063
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan studi pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 30 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Siti Komariyah S.E., M.Si
NIP. 1971106102001122002

Dr. Regina Niken Wilantari S.E., M.Si
NIP. 197409132001122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin.M.Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

PENGARUH UPAH MINIMUM, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), DAN INVESTASI PMDN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Yasin

NIM : 140810101063

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

23 November 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Sunlip Wibisono, M.KES. (.....)
NIP. 195812061986031003
2. Sekretaris : Dr. Rafael Purtomo S, M.Si. (.....)
NIP. 195810241988031001
3. Anggota : Dr. Lilis Yuliati S.E. M.Si. (.....)
NIP. 196907181995122001

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M, Ak.
NIP 19710727 199512 1001

PENGARUH UPAH MINIMUM , PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) , DAN INVESTASI PMDN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Muhammad Yasin

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi di negara berkembang dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan kerja. Pendekatan pertumbuhan ekonomi banyak dilakukan di beberapa daerah dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Jenis penelitian adalah *explanatory reseach* yang bertujuan mengetahui hubungan antar variabel dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Investasi PMDN terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan Fixed Effect dan dikaitkan dengan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur dan investasi PMDN tidak signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, UMP, PDRB, dan Investasi PMDN

THE EFFECT OF MINIMUM WAGE, REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT (GRDP) AND INVESTMENT DOMESTIC ABSORPTION OF LABOR IN EAST JAVA

Muhammad Yasin

*Development Economics Departemen, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

Economic development in developing countries can be measured from the high economic growth and increase employment opportunities. Approach to economic growth is mostly done in several areas in developing local economic sectors are expected to increase the absorption of crimes. This type of research is explanatory research which aims to determine the relationship between variables where the variables used in this study is the minimum wage, Gross Domestic Product (GDP) and Domestic Investment to Labor Absorption in the province of East Java. The method used in this study is panel data with Fixed Effect approach and is associated with descriptive analysis Based on the results of the study showed that the district / city minimum wage variable had a significant positive effect on employment in East Java Province, gross regional domestic product (GRDP) had a significantly positive effect on employment in East Java Province and domestic investment was not significantly positive for labor absorption work in East Java Province.

Keywords: Absorption of Labor, Minimum Wages, GRDP and Domestic Investment.

RINGKASAN

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan aspek lain dalam perekonomian seperti perkembangan pendidikan, perkembangan kemahiran tenaga kerja, perbaikan teknologi, dan kenaikan dalam taraf kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi atau hubungan antara berbagai variabel diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, modal, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya, dimana manusia merupakan tenaga kerja, pelaku pembangunan, input pembangunan dan konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri (Sukirno 2013:445).

Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara berkembang dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan kerja. Pendekatan pertumbuhan ekonomi banyak dilakukan di beberapa daerah dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya penyerapan perkapita. Pembangunan ekonomi juga merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk menggerakkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat sebagai implikasi dari perkembangan ini, kesempatan kerja akan bertambah, tingkat Penyerapan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno,2006:9).

Penelitian ini menggunakan penelitian *explanatory reseach* yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Tempat dan waktu dilaksanakan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2010 – 2016. Adapun sumber data yang diambil yaitu dari BPS Jawa Timur, buku literature, jurnal, penelitian terdahulu dan searching internet. Tujuan dari penelitian

ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel bebas (UMK, PDRB dan Investasi PMDN) dengan variabel terikat (Penyerapan Tenaga Kerja). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel dengan menggunakan alat analisis Eviews 9. Data panel merupakan data gabungan dari data cross section dan data time series. Penelitian ini menggunakan metode *Fixed Effect model*. Uji statistik menggunakan koefisien determinasi (R^2), pengujian simultan (Uji F), dan pengujian parsial (Uji t), dan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) nilai probability sebesar 0,0398 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 dengan nilai koefisien 5.142564 artinya setiap kenaikan 1 Rupiah UMK akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. PDRB memiliki nilai probability sebesar 0,0075 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 dan nilai koefisien sebesar 1.076435 artinya setiap kenaikan 1 Miliar PDRB akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Investasi PMDN memiliki nilai probability sebesar 0,1077 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0.003435 artinya investasi PMDN tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa upah minimum Kabupaten/Kota dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan investasi PMDN tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur 2010–2016.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Investasi PMDN terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur*” Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Siti Komariyah S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Regina Niken Wilantari S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dra. Anifatul Hanim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Dr. Sebastiana Viphindaratin, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa.

7. Ibunda Sahyati dan Ayahanda Kuswanto yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa terimakasih banyak atas segala kasih sayang, dukungan dan doa pastinya yang selalu Beliau panjatkan teruntuk anak-anaknya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.
8. Nenek Sumah dan Nenek Moraji yang memberikan semangat dan do'a yang selalu beliau panjatkan.
9. Kedua adikku, Siti Nur Azizah dan Ahmad Sandi Arief terimakasih sudah menjadi pengingat dan penghibur disaat penulis mulai lelah akan segala tugas yang akan diselesaikan.
10. Teman-teman KKN 17 UMD desa Ardisaeng, Bondowoso. Terima kasih untuk 45 harinya yang sangat berkesan.
11. Terimakasih kepada sahabat tercinta yang telah mengisi hari-hari dan membantu memberi dorongan akan kelulusan Penulis (Keluarga Cemara) Kinanthi, Vinky, Erlinda, Wanda, Titut, Dita, Amel, Fanny, Dina, Rosi, Seka, Ajih, Ilyas, Juni, Bima, Ali, Rizal Azizi, Try Yulianto, Rofiq, Elphas dan Ardan terimakasih atas motivasinya.
12. Teman – Teman ilmu ekonomi studi pembangunan angkatan 2014 terima kasih yang telah memberikan dukungan dan doanya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 30 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Teori	10
2.1.1 Tenaga Kerja	10
2.1.2 Konsep Tenaga Kerja	10
2.1.3 Penawaran Tenaga Kerja	11
2.1.4 Permintaan Tenaga Kerja	14
2.1.5 Upah Minimum	16
2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto	18
2.1.7 Investasi	20
2.1.8 Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	22
2.1.9 Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	22

2.1.10 Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Kerangka Konseptual	28
2.4 Hipotesis	29
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Rancangan Penelitian	31
3.1.1 Jenis Penelitian.....	31
3.1.2 Unit Analisis	31
3.1.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.2 Metode Analisis Data	31
3.2.1 Analisis Regresi Data Panel.....	31
3.3 Pemilihan Metode	34
3.4 Asumsi Klasik.....	35
3.4.1 Uji Normalitas.....	35
3.4.2 Uji Multikolinieritas	35
3.4.3 Uji Heterokedastisitas.....	36
3.5 Pengujian Hipotesis.....	36
3.6 Definisi Operasional.....	40
BAB 4. PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum	41
4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Jawa Timur	41
4.1.2 Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja Jawa Timur	41
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	44
4.2.1 Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur	44
4.2.2 Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur	45
4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur	48
4.2.4 Investasi PMDN di Jawa Timur	50
4.3 Hasil Regresi Panel	52
4.3.1 Estimasi Model Regresi Panel	53
4.4 Hasil Uji Statistik	54
4.4.1 Uji Simultan (Uji F)	54
4.4.2 Uji Parsial (Uji t)	55

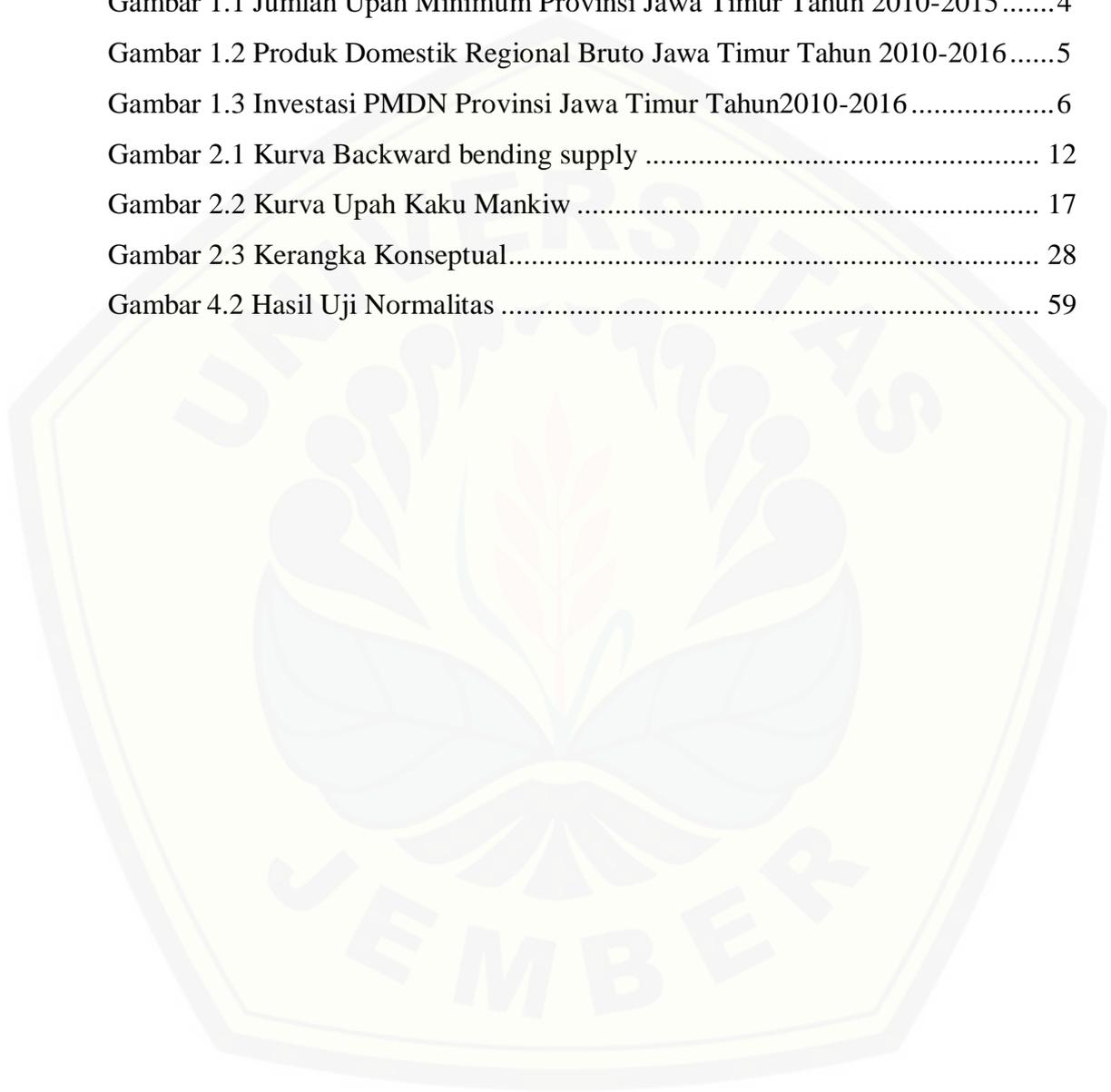
4.4.3 Koefisien Determinasi (Uji R)	56
4.5 Uji Asumsi Klasik	56
4.5.1 Uji Multikolinieritas	57
4.5.2 Uji Heteroskedasitas	57
4.5.3 Uji Normalitas	58
4.5.4 Hasil Estimasi Individual Effect	59
4.6 Pembahasan	61
4.6.1 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	63
4.6.2 Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	65
4.6.3 Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	66
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1 Uji Pemilihan Model	32
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur	42
Tabel 4.2 Jumlah Angkatan kerja Provinsi Jawa Timur	43
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Bekerja Provinsi Jawa Timur	44
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ..	45
Tabel 4.5 UMK Provinsi Jawa Timur	47
Tabel 4.6 PDRB Provinsi Jawa Timur	49
Tabel 4.7 Investasi PMDN Provinsi Jawa Timur	51
Tabel 4.8 Uji Chow.....	52
Tabel 4.9 Hasil Uji Hausman	53
Tabel 4.10 Hasil Regresi Panel	53
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	55
Tabel 4.12 Hasil Uji t.....	55
Tabel 4.13 Hasil Uji R	56
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas.....	57
Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedasitas	58
Tabel 4.16 Hasil Estimasi Individual Effect	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015	4
Gambar 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Tahun 2010-2016	5
Gambar 1.3 Investasi PMDN Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016	6
Gambar 2.1 Kurva Backward bending supply	12
Gambar 2.2 Kurva Upah Kaku Mankiw	17
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	59



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

A.1. Data Jumlah Penduduk yang bekerja di Jawa Timur Tahun 2010-2016.....	74
A.2. Data Upah Minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2010-2016.....	75
A.3. Data PDRB ADHK di Jawa Timur Tahun 2010-2016.....	76
A.4. Data Investasi PMDN Kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2010-2016.....	77
B. Hasil Analisis Regresi Data Panel	78
C.1. Hasil Chow (Chow - test)	79
C.2. Hasil Uji Hausman (Hausman - Test).....	79
D.1. Hasil Uji Multikolinearitas	80
D.2. Hasil Uji Normalitas.....	80
D.3. Hasil Uji Heterokedasitas	80
E. Hasil Estimasi Individual Effect di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016..	82

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan aspek lain dalam perekonomian seperti perkembangan pendidikan, perkembangan kemahiran tenaga kerja, perbaikan teknologi, dan kenaikan dalam taraf kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi atau hubungan antara berbagai variabel diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, modal, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya, dimana manusia merupakan tenaga kerja, pelaku pembangunan, input pembangunan dan konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri (Sukirno, 2013:445).

Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara berkembang dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan kerja. Pendekatan pertumbuhan ekonomi banyak dilakukan di beberapa daerah dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya penyerapan perkapita. Pembangunan ekonomi juga merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk menggerakkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat sebagai implikasi dari perkembangan ini, kesempatan kerja akan bertambah, tingkat Penyerapan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2006:90).

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah melaksanakan pembangunan itu sendiri yaitu para pekerja khususnya dan seluruh penduduk Indonesia pada umumnya. Indonesia sebagai negara berpendudukan terbesar ke lima di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 250 juta orang pada tahun 2012, berarti merupakan negara yang memiliki sumber daya

manusia yang besar yang menjadi potensi besar untuk menggerakkan pembangunan (Subagiarta, 2012:140).

Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malahan proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten diusaha rakyat. Dia tidak memberikan gambaran adanya gerakan menuju keadaan stasioner tetapi menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum tercapainya tingkat tertinggi dari pembangunan. Jadi menurut Malthus proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih dari pada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi.

Malthus (1776-1824) menitik beratkan pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara yang bergantung pada kuantitas penduduk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.

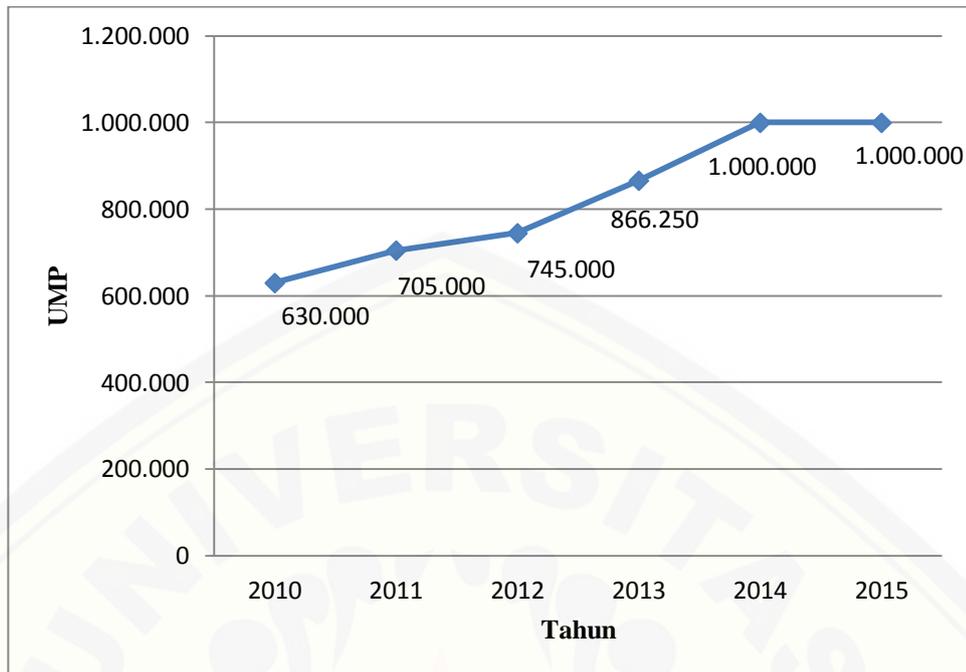
Dalam konteks pembangunan ekonomi, tujuan dari pertumbuhan ekonomi suatu negara bukanlah untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya secara keseluruhan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai sektor, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital ataupun modal maupun sumber daya lainnya yang berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Todaro, 2000:132).

Kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh upah. Upah ditetapkan pada tiap provinsi berbeda sesuai dengan Upah Minimum masing-masing provinsi. Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Dahulu upah minimum provinsi dikenal dengan istilah upah minimum regional tingkat. Dasar hukum penetapan

upah minimum provinsi adalah Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum minimum. Upah minimum provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun dan melalui proses yang panjang. Dewan Pengupahan Daerah (DPD) membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Komponen kebutuhan hidup layak (KHL) digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 pasal 1 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi disebut upah minimum provinsi, sedangkan upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota (UMK). Upah minimum provinsi ditetapkan oleh gubernur, selain itu gubernur juga dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota. Besaran UMK yang ditetapkan lebih besar dari Upah minimum provinsi.

Dalam hal ini upah minimum juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Konsep upah minimum berarti pekerja akan mendapatkan upah sebesar kebutuhan hidup minimum untuk diri dan keluarganya. Upah minimum di sini tidak termasuk kebutuhan-kebutuhan sosial atau kebutuhan sekunder. Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk region atau wilayah-wilayah diseluruh Indonesia. Penentuan besarnya upah minimum dengan memperhatikan faktor-faktor seperti: kemampuan perusahaan, keadaan perekonomian daerah atau nasional, tingkat pengupahan di sektor atau sub sektor yang sama pada wilayah atau provinsi lain, standar kebutuhan hidup pekerja dan keluarga (Priyono, 2011).



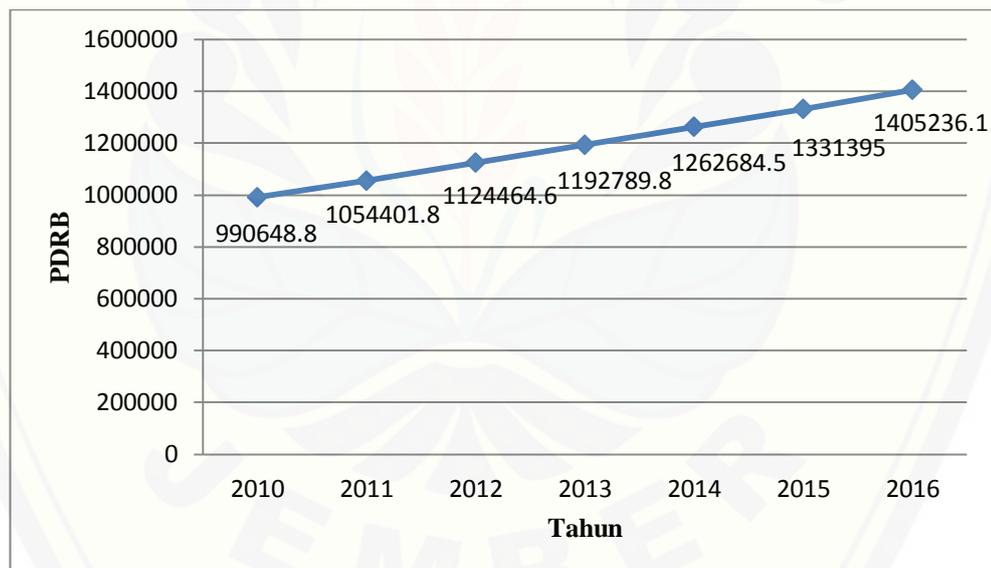
Gambar 1.1 Jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur Tahun 2010-2015
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016)

Seperti terlihat pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah Upah minimum provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 adalah 630.000. Terus meningkat di tahun berikutnya hingga pada tahun 2015 mencapai 1.000.000. Selanjutnya Jawa timur menetapkan Upah minimum provinsi 2017 sebesar 1.388.000 naik dari upah minimum provinsi 2016 yang sebesar 1.283.700. Kenaikan jumlah upah minimum provinsi Jawa Timur dapat disebabkan beberapa faktor salah satunya yakni pembangunan diseluruh sektor. Banyaknya pembangunan pabrik sektor industri mengakibatkan kenaikan upah minimum provinsi Jawa Timur. Selain pembangunan pabrik terdapat pembangunan mall dan hotel yang sangat banyak di Jawa Timur.

Penelitian Dewi (2013) mengenai pengaruh investasi dan tingkat upah terhadap kesempatan kerja di Jawa Timur menemukan bahwa tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Ketika upah meningkat sebesar 1% maka kesempatan kerja juga meningkat sebesar 1,604143. Peningkatan upah ditandai dengan meningkatnya konsumsipara pekerja sehingga terjadi kenaikan permintaan barang dan jasa. Kenaikkan permintaan barang dan jasa akan menyebabkan produksi barang dan jasa perusahaan meningkat, yang

pada akhirnya akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah secara tidak langsung dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki letak strategis di pulau jawa. Hal ini dikarenakan letak Jawa Timur yang menjadi pintu gerbang perdagangan antara kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia. Posisi strategis ini menjadikan kegiatan perekonomian di Jawa Timur berkembang dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur dan didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan sumber daya lokal, pembangunan ekonomi daerah mengalami kemajuan dari sisi nilai ekonomi. Nilai ekonomi tersebut termanifestasi dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2010-2016
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) di Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2010-2016. Pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) di Jawa Timur tersebut tentunya akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas dan

Nenik (2009) menyatakan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, apabila produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat 1% maka penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 1,23%.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru ternyata belum dapat terealisasi secara optimal. Peran yang besar dalam perekonomian nasional, menunjukkan bahwa ekonomi Jawa Timur benar-benar telah menjadi salah satu wujud keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dari segi makroekonomi. Hal yang juga disadari bahwa keberhasilan hal makroekonomi belum dapat dijadikan patokan bahwa agenda pembangunan ekonomi daerah akan seterusnya berlanjut dalam jangka panjang memberikan hasil seperti demikian.



Gambar 1.3 investasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016
(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa Investasi di Jawa Timur meningkat dari tahun 2010-2016, pada tahun 2010 jumlah investasi sebesar Rp 8084,1 miliar hingga pada tahun 2014 sebesar Rp 38132 miliar, terjadi penurunan pada tahun 2015 nilai investasi menurun menjadi Rp 35489,8 miliar, namun pada tahun 2016 nilai investasi meningkat sebesar Rp 46331,6 miliar. Peningkatan investasi ini

dikarenakan investor percaya untuk berinvestasi di Jawa Timur. Maka dengan ini investasi mempunyai hubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja dimana investasi setiap tahun mengalami kenaikan dan penyerapan tenaga kerja. Sumanto (2006:130) mengemukakan dalam penelitiannya mengindikasikan bahwa bidang investasi di Jawa Timur bergeser dari bidang yang sebelumnya adalah padat karya ke bidang yang padat modal. Karena bergesernya kebidang yang padat modal efek terhadap penyerapan tenaga kerja semakin sedikit per modal yang dikeluarkan.

Peningkatan investasi juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada. Peningkatan jumlah perusahaan maka jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan akan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Marselina, 2016).

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Simanjuntak, 2002:146). Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur mulai tahun 2010 sampai 2013 selalu mengalami peningkatan dari 19.527.000 (2010) menjadi 20.432.453 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 20.149.998 atau menurun sebesar 16,17% dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 20.274.681.

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja dan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Karena jika terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan atau perluasan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran yang kemudian akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada dan meningkatnya beban masyarakat. Semua itu merupakan sumber utama penyebab kemiskinan, mendorong terjadinya keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi jangka panjang. Fenomena ini menjadi menarik karena menunjukkan adanya efek perubahan yang ditimbulkan

disetiap terjadi peningkatan upah, khususnya Upah Minimum Provinsi Jawa Timur dalam periode tertentu.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh upah minimum, produk domestik regional bruto (PDRB) dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.?
- b. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.?
- c. Apakah Investasi PMDN berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah-masalah diatas ingin yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Investasi PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung:

a. Bagi Provinsi Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan bahan evaluasi bagi Provinsi Jawa Timur mengenai seberapa besar pengaruh Upah minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Investasi PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai wadah dalam mengasah daya pikir dan instrumen pelatihan penulisan karya ilmiah dengan pemanfaatan ilmu teoritis dan kajian aktualisasi sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan yang lebih luas

c. Bagi Akademisi

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan referensi penelitian selanjutnya dengan mengangkat topik yang sama.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Tenaga Kerja

Menurut Simanjuntak (1998:148), tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Mulyadi (2003:70-71) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan bekerja serta golongan menganggur dan mencari pekerjaan.

Teori Klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa (Mulyadi, 2003:83). Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

2.1.2 Konsep Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan modal bagi gerak roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan

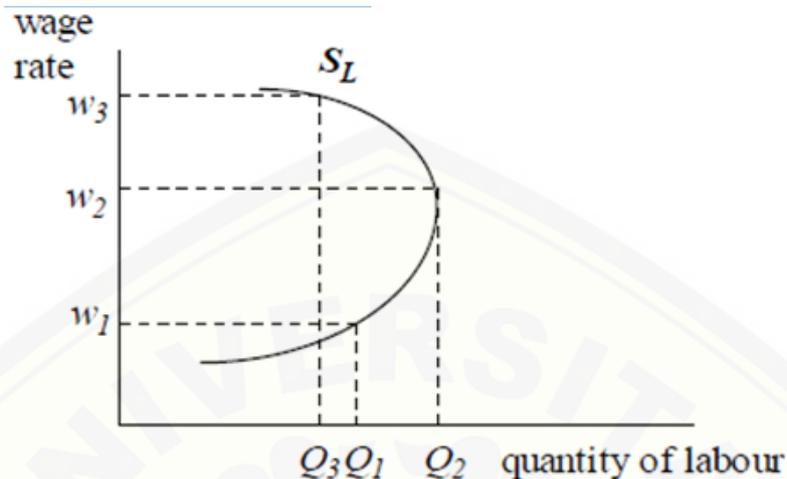
berlangsungnya proses demografi. Tenaga kerja merupakan penduduk dengan batas umur minimal 15 tahun tanpa batas maksimal. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan saling berkaitan. Keterkaitan itu mencakup tenaga kerja dengan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Permasalahan pokok dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan nasional adalah prestasi *full employment* dan perbaikan struktur hidup masyarakat. Dipihak lain alat kebijakan ekonomi belanja dimaksudkan untuk membantu dalam menentukan jumlah permintaan tenaga kerja. Sementara kebijaksanaan makro ekonomi menentukan tingkat jumlah kesempatan kerja, maka kebijakan ketenagakerjaan dapat menambah efektifnya penggunaan kebijaksanaan fiskal, moneter dan anggaran belanja dengan menyediakan secara tepat guna sumber daya untuk kesempatan kerja yang maksimum maupun untuk menyelesaikan masalah struktur. Program-program ketenagakerjaan jika digunakan bersama dengan kebijakan fiskal dan moneter dapat mengurangi masalah struktur yang bercirikan adanya pengangguran yang tinggi (Barthos, 2004 dalam Utari, 2018).

2.1.3 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang ingin bekerja atau tidak. Keputusan ini tergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, digunakan untuk kegiatan lain yang sifatnya lebih santai (konsumtif), atau kombinasi keduanya. Apabila dikaitkan dengan tingkat upah, maka keputusan untuk bekerja seseorang akan dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Apabila penghasilan tenaga kerja relatif sudah cukup tinggi, maka tenaga kerja tersebut cenderung untuk mengurang waktu yang dialokasikan untuk bekerja. Hal tersebut menyebabkan bentuk dari kurva

penawaran membelok ke kiri yang dikenal dengan *backward bending supply curve* (Sumarsono, 2003:12).



Gambar 2.1: Kurva *Backward bending supply* (Sumber: Sumarsono, 2003:12)

Kurva penawaran tenaga kerja yaitu hubungan antara jam kerja dan tingkat upah. Misalkan seseorang akan memasuki pasar kerja jika upah yang ditawarkan melebihi dari upah reservasi (\hat{w}). Pada tingkat upah diatas upah reservasi, kurva penawaran tenaga kerja memiliki slope positif sampai pada titik tertentu. Keadaan selanjutnya akan berubah jika seseorang kesejahteraannya sudah baik atau mempunyai suatu keahlian yang lebih dan jumlah jam kerja yang ditawarkan semakin berkurang pada saat upah meningkat yang mengakibatkan slope kurva penawaran tenaga kerja menjadi negatif. Kurva ini disebut kurva penawaran tenaga kerja melengkung ke belakang (*backward bending labour supply curve*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja (Khairani, 2010) yaitu:

1. Jumlah Penduduk

Makin besar jumlah penduduk, makin banyak tenaga kerja yang tersedia baik untuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja dengan demikian jumlah penawaran tenaga kerja juga akan semakin besar.

2. Struktur Umur Penduduk

Indonesia termasuk dalam struktur umur muda, ini dapat dilihat dari bentuk piramida penduduk Indonesia. Meskipun penambahan penduduk dapat ditekan

tetapi penawaran tenaga kerja semakin tinggi karena semakin banyaknya penduduk yang memasuki usia kerja, dengan demikian penawaran tenaga kerja juga akan bertambah.

3. Produktivitas

Produktivitas merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya kaitan antara output dan jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seseorang tenaga kerja yang tersedia. Secara umum produktivitas tenaga kerja merupakan fungsi daripada pendidikan, teknologi, dan keterampilan. Semakin tinggi pendidikan atau keterampilan tenaga kerja maka semakin meningkat produktivitas tenaga kerja.

4. Tingkat Upah

Secara teoritis, tingkat upah akan mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila tingkat upah naik, maka jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat dan sebaliknya. Hal ini dapat dibuktikan pada kurva penawaran tenaga kerja yang *berslope* positif.

5. Kebijakan Pemerintah

Dalam menelaah penawaran tenaga kerja maka memasukkan kebijakan pemerintah kedalamnya adalah sangat relevan. Misalnya kebijakan pemerintah dalam hal belajar 9 tahun akan mengurangi jumlah tenaga kerja, dan akan ada batas umur kerja menjadi lebih tinggi. Dengan demikian terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja.

6. Keadaan perekonomian

Keadaan perekonomian dapat mendesak seseorang untuk bekerja memenuhi kebutuhannya, misalnya dalam satu keluarga harus bekerja semua apabila pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, atau seorang mahasiswa yang tamat tidak mau bekerja karena perekonomian orang tua sangat memadai, atau seorang istri tidak perlu bekerja karena perekonomian suami sudah mencukupi.

Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengarnbil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini

didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi (Sukirno, 2008:145).

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Solow didasarkan pada pandangan klasik yaitu perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh dan tingkat pemanfaatan maksimal dari faktor-faktor produksinya sehingga perekonomian terus berkembang. Menurut teori ini, rasio modal-output (*capital-output ratio*) tidak tetap. Artinya, untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda.

2.1.4 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang bersedia dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan dalam periode tertentu. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk diperkerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.

Adam smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dalam aliran ekonomi yang kemudian di kenal sebagai aliran klasik . Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh denagan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

Adapun beberapa permintaan tenaga kerja dipengaruhi sebagai berikut:

1) Perubahan tingkat upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut: Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsinya atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*. Pengusaha lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Kondisi seperti ini terjadi apabila upah naik dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tetap. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja. Baik efek skala produksi maupun efek substitusi akan menghasilkan suatu bentuk kurva permintaan tenaga kerja yang mempunyai *slope negatif*.

2) Perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya, untuk maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

3) Harga barang modal turun

Apabila harga barang modal turun maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula.

Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antar tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dihendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, ini berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang itu memberikan nikmat (*utility*) kepada si pembeli. Sementara pengusaha mempekerjakan seorang karena memproduksi barang untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksinya (Simanjuntak, 2002:53-54).

2.1.5 Upah Minimum

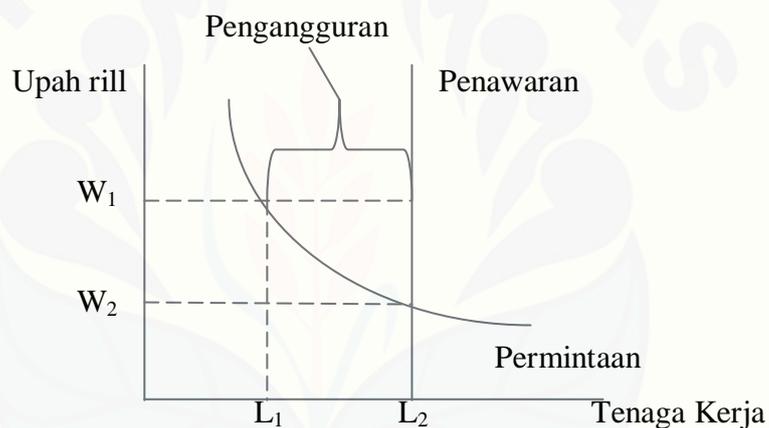
Menurut Gilarso dalam Alghofari (2010), balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Menurut Gilarso upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh). Di Indonesia banyak orang berusaha sendiri dan tidak memperhitungkan upah untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam analisis ekonomi, besar kecilnya balas karya mereka sebagai tenaga kerja seharusnya ikut diperhitungkan.

Teori Klasik menyatakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor-faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari faktor produksi tersebut, dengan kata lain tenaga kerja memperoleh upah senilai dengan pertumbuhan hasil marjinalnya.

Kebijakan dalam pemberlakuan dan peningkatan upah riil berpengaruh negatif sebab dapat menyebabkan terjadinya pengangguran dalam masyarakat. Adanya tuntutan kenaikan UMK pada tiap kota setiap tahunnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kaum buruh, disisi lain (pengusaha) justru berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran. Hal

tersebut dikarenakan jika UMK meningkat maka biaya produksi yang dikeluarkan cukup tinggi, sehingga terjadi inefisiensi pada perusahaan dan akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi dan hal ini akan berakibat berkurangnya tenaga kerja (Kumiawan dan Herniwati 2013).

Menurut Mankiw (2007:370), rendahnya penyerapan tenaga kerja terjadi akibat adanya kekakuan upah (*wage rigidity*) yaitu tidak mempunyai upah dalam melakukan penyesuaian sampai titik ekuilibrium, dimana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. rendahnya penyerapan tenaga kerjayang disebabkan kekakuan upah akibat penyesuaian antara jumlah pekerja yang menginginkan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia.



Gambar 2.2 Kurva Upah Kaku (Sumber: Mankiw, 2007:370).

Berdasarkan asumsi bahwa penerapan kebijakan mengenai upah minimum (sebesar W_1) di atas tingkat keseimbangan yang terjadi adalah kekakuan upah. Upah tidak akan bergerak menuju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum. Upah tidak akan turun (*rigid*) ke W_2 akibat adanya kebijakan upah minimum sebesar W_i . Karena itu, sektor usaha akan mengurangi jumlah pekerjanya menjadi L_i sehingga timbul pengangguran sebesar L_2 dikurangi (Mankiw, 2007:370).

Dalam hal ini aspek upah menjadi penting, karena penghargaan (upah) akan menjadi efektif jika dihubungkan dengan kinerja secara nyata. Strategi upah yang efektif diharapkan dapat memberikan sumbangan pada terpeliharanya

kelangsungan hidup satuan kerja, terwujudnya visi dan misi dan untuk pencapaian sasaran kerja melalui produktivitas yang tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada (Salvatore dalam Kurniawan, 2013).

Jhon Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah.

2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Menganalisis suatu region atau membicarakan pembangunan regional tidak mungkin terlepas dari membahas tingkat pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Pembangunan wilayah haruslah bersangkut paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut, yaitu yang dimaksud adalah pendapatan rata-rata (*income per capita*) masyarakat (Tarigan, 2005:80).

Hukum Okun (Okun's Law) menjelaskan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja, bahwa jika terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terjadi disuatu daerah maka penyerapan tenaga kerja disuatu daerah tersebut juga akan meningkat. Hukum Okun (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1% dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2%. Dengan kata lain, PDRB yang pada akhirnya mempengaruhi GDP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Salah satu indikator untuk melihat kemajuan perekonomian suatu daerah adalah dengan mencermati nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu biasanya dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto sebagai nilai barang-barang jasa yang dihasilkan oleh satu daerah dari suatu Negara selama kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun ditambah hasil produksi barang dan jasa yang berada pada konsumen tingkat akhir. Adapun nilai tambah yang terjadi merupakan nilai akhir barang dan jasa yang dikonsumsi oleh tingkat akhir (Irwan, 2010).

Menurut Deliarnov (1995:130), PDRB dibedakan menjadi dua yaitu:

1. PDRB atas harga konstan merupakan jumlah produksi barang dan jasa yang dinilai berdasarkan harga yang ditetapkan pada tahun tertentu.
2. PDRB atas harga yang berlaku merupakan jumlah produksi barang dan jasa yang dinilai berdasarkan harga yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan.

Berikut ini terdapat tiga pendekatan cara menghitung PDRB dengan menggunakan metode langsung (Tarigan, 2007:110) yaitu :

1. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan Pengeluaran adalah penentuan pendapatan Regional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dari barang maupun jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan, maka total keseluruhan dari produksi barang dan jasa tersebut digunakan untuk konsumsi:

- 1) rumah tangga;
- 2) konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan;
- 3) konsumsi pemerintah;
- 4) pembentukan modal tetap hruto (investasi);
- 5) perubahan stok;
- 6) ekspor netto (total ekspor dikurangi total impor).

2. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi merupakan cara penentuan pendapatan regional yang dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh masing-masing sektor perekonomian. Oleh karena untuk menghitung pendapatan regional dengan menggunakan pendekatan langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan nilai produksi dari masing-masing sektor tersebut.

3. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang diterima adalah upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam perhitungan PDRB kecuali balas jasa faktor produksi termasuk komponen penyusutan dan pajak tak langsung netto. Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto.

Mankiw (2006:248) menjelaskan, hukum okun adalah relasi negatif antara pengangguran dan GDP. Hukum okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hukum Okun (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1% dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2%. Dengan kata lain, PDRB yang pada akhirnya mempengaruhi GDP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah PDRB akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya penurunan jumlah PDRB akan berpengaruh pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

2.1.7 Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Sukirno (2000:167) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf masyarakat. Peran ini bersumber tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

1. Investasi merupakan salah satu konsumen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas produksi.

3. Investasi akan selalu di ikuti perkembangan teknologi.

Harrod-Domar (Mulyadi, 2003:110) dalam teorinya menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi, kapasitas produksi yang membesar tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar pula, dimana dalam kondisi seperti ini diasumsikan bahwa tenaga kerja meningkat secara geometris dan selalu *full employment*.

Investasi berbeda dengan tabungan, tabungan biasanya dilakukan oleh perorangan dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai tujuan penabung, sedangkan investasi dilakukan oleh suatu bisnis atau perusahaan dengan tujuan yang ditentukan oleh bisnis itu sendiri (Rosyidi, 1998:167). Investasi merupakan pengeluaran yang ditunjukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal, sedangkan tabungan adalah bagian dari penyerapan yang tidak terpakai dalam pemenuhan barang dan jasa. Investasi mempunyai peranan yang nyata dalam perekonomian melalui dua cara, yaitu melalui *aggregate demand* dan *aggregate supply*. Investasi mempengaruhi *aggregate demand* melalui peningkatan penyerapan nasional dan tingkat kesempatan kerja, peningkatan penyerapan nasional ini akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat yang kemudian akan menyebabkan terjadinya peningkatan kapasitas produksi sehingga pada akhirnya juga akan meningkatkan *aggregate supply*.

Investasi dapat berupa penanaman modal melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1967, PMA adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini yang digunakan untuk menjalankan perusahaan Indonesia, artinya pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut, perluasan dan alih status yang terdiri dari saham peserta Indonesia, saham asing dan modal pinjaman. Sedangkan pengertian PMDN menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1968 adalah bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara, swasta nasional maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan dan disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam ketentuan-

ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1967, tentang PMA. Menurut undang-undang ini perusahaan yang dapat menggunakan modal dalam negeri dapat dibedakan antara perusahaan nasional dan perusahaan asing, dimana perusahaan nasional dapat dimiliki seluruhnya oleh negara atau swasta nasional atau sebagai usaha gabungan antara negara atau swasta nasional dengan swasta asing dimana sekurang-kurangnya modal dimiliki oleh negara. Pada prinsipnya semua bidang usaha terbuka untuk swasta atau PMDN kecuali bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis.

2.1.8 Pengaruh Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja

Perubahan upah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Bagi perusahaan upah merupakan biaya produksi sehingga pengusaha akan meminimalkan biaya produksi, yaitu upah untuk mencapai keuntungan yang optimal. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Apabila harga naik, konsumen akan mengurangi konsumsi. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan produsen terpaksa menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan.

kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja. Karena semakin tinggi tingkat upah yang ditentukan, akan sangat berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Akibatnya perusahaan, perusahaan akan melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai tindakan efisiensi, upah dipandang sebagai beban oleh pengusaha, karena semakin besar tingkat upah akan semakin kecil tingkat keuntungan yang dinikmati pengusaha. Oleh karena itu kenaikan tingkat upah akan direspon oleh pengusaha dengan menurunkan jumlah tenaga kerja (Tambunsaribu, 2013).

2.1.9 Pengaruh (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi suatu wilayah akan

meningkat, output yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja (Listyaningsih, 2017)

2.1.10 Pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja

Kegiatan investasi memungkinkan masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Investasi yang dilakukan dalam perusahaan akan mempengaruhi perluasan dari kesempatan kerja. Hal tersebut terjadi dikarenakan dengan adanya investasi maka proses produksi akan lebih meningkat dan untuk melakukan proses produksi memerlukan tenaga manusia, sehingga perusahaan membutuhkan tenaga kerja.

Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan kesempatan kerja menurut Harrod Domar, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan di tingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja (Dumairy, 1997:155-156).

Dengan demikian investasi merupakan variabel yang penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dikarenakan investasi dengan penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif sehingga semakin besar investasi yang dilakukan maka semakin banyak tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Haryo Kuncoro (2002). Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah, Output, dan Variabel dummy perubahan teknologi terhadap Jumlah tenaga yang terserap. Penelitian ini berjudul “Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja”. Penelitian ini dilakukan dengan metode data panel dan jenis data sekunder. Hasil

dari penelitian ini menyatakan bahwa secara signifikan upah lebih besar berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja dan Output signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian kedua dilakukan oleh Dimas dan Nenek Woyanti (2009) dalam artikel yang berjudul: “Pengaruh PDRB, Upah Riil, dan Investasi Riil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta”. Penelitian dilakukan dengan metode *time series* dengan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa PDRB signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan upah riil serta investasi riil signifikan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rizal Azaini (2014) dalam artikel yang berjudul: “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Upah Minimum, Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja”. Penelitian dilakukan dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan investasi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja dan upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

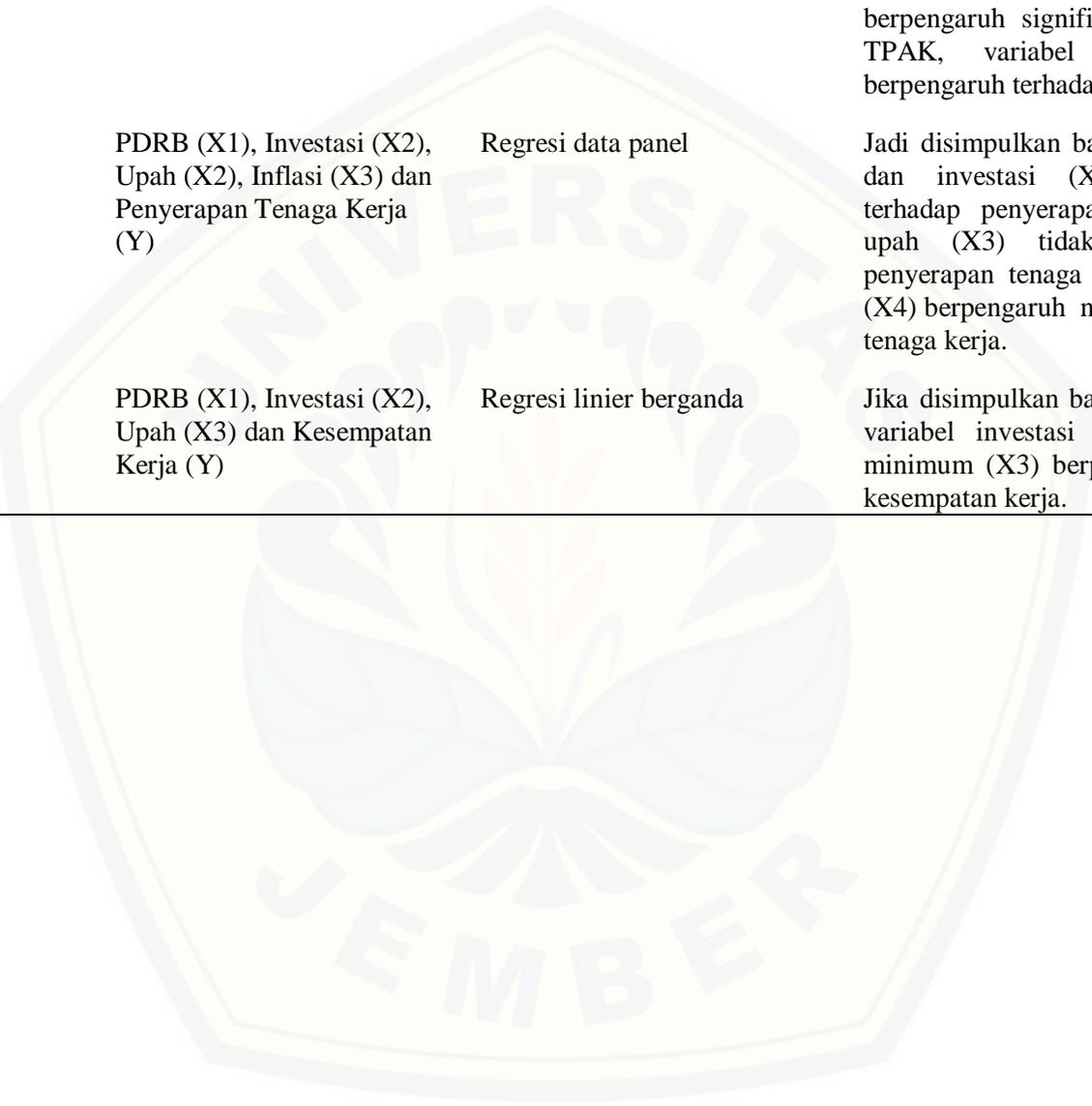
Penelitian keempat dilakukan oleh Febryana Rizky Wasilaputri (2016) yang berjudul: “Pengaruh upah minimum provinsi, PDRB, dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dipulau jawa tahun 2010-2014”. Penelitian dilakukan dengan metode data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian kelima dilakukan oleh Daru Mahendras Wara (2016) tentang “Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum dan Investasi Terhadap TPAK Pada 38 Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014”. Dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda Data Panel. Jenis data nya merupakan data sekunder. Jika disimpulkan penelitian ini variabel PDRB (X1) berpengaruh signifikan dengan hubungan positif terhadap TPAK, variabel upah minimum (X2) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap TPAK, variabel investasi (X3) tidak berpengaruh terhadap TPAK.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel-variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil (Kesimpulan)
1	Kuncoro (2002)	Upah (X1), Output (X2), Variabel dummy perubahan teknologi (X3), Penyerapan Tenaga Kerja (Y2)	Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan upah lebih besar berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja dan Output signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
2	Dimas (2009)	PDRB(X1), Upah Riil (X2), Investasi Riil (X3), dan Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	<i>Time series</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan upah riil serta investasi riil signifikan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.
3	Rizal Azaini (2014)	Pertumbuhan Penduduk (X1), Upah Minimum (X2), Investasi (X3), dan Penyerapan tenaga kerja (Y)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap kesempatan kerja dan upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.
4	Wasilaputri (2016)	Upah minimum (X1), PDRB (X2), Investasi(X3), dan Penyerapan tenaga kerja (Y)	Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

5	I Gusti Agung Indra Dewa (2015)	Inflasi (X1), PDRB(X2), upah minimum (X3), dan penyerapan tenaga kerja (Y).	Regresi Linier Berganda	Inflasi, PDRB dan Upah Minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel Inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan, variabel PDRB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja diBali dan varibael Upah minimum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja diBali.
6	Budi Utami (2009)	Upah minimum Kabupaten (X1), PDRB (X2), Investasi(X3) dan Penyerapan tenaga kerja (Y)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember. Sedangkan variabel PDRB, angkatan kerja dan investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember.
7	Pangastuti (2015)	PDRB (X1), Upah minimum Kabupaten (X2), pendapatan asli daerah (PAD) (X3), dan penyerapan tenaga kerja (Y)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat signifikan 0.05 pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif, pengaruh UMK terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan positif dan pengaruh PAD terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan positif.
8	Wara (2016)	PDRB (x1), Upah Minimum (x2), Investasi (x3) dan TPAK (Y)	Regresi Linier Berganda Data Panel	Jika disimpulkan hasil penelitian ini menunjukan variabel PDRB (X1) berpengaruh signifikan dengan hubungan positif terhadap TPAK, variabel upah minimum (X2)



9	Elmi Lavianty (2016)	PDRB (X1), Investasi (X2), Upah (X2), Inflasi (X3) dan Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Regresi data panel	berpengaruh signifikan dan negatif terhadap TPAK, variabel investasi (X3) tidak berpengaruh terhadap TPAK.	Jadi disimpulkan bahwa variabel PDRB (X1) dan investasi (X2) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel upah (X3) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan variabel inflasi (X4) berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.
10	Bagus Prakoso (2015)	PDRB (X1), Investasi (X2), Upah (X3) dan Kesempatan Kerja (Y)	Regresi linier berganda	berpengaruh signifikan dan negatif terhadap TPAK, variabel investasi (X3) tidak berpengaruh terhadap TPAK.	Jika disimpulkan bahwa variabel PDRB (X1), variabel investasi (X2) dan variabel upah minimum (X3) berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menunjukkan alur berfikir secara konseptual yang terfokus pada tujuan dilaksanakan suatu penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Kerangka konseptual dapat diturunkan baik dari teori-teori yang mendasari penelitian kemudian diturunkan kedalam variabel-variabel yang terkait dengan penelitian hingga dapat dirumuskan alur berfikir secara konseptual mengenai penelitian yang dilakukan.

penelitian ini bertujuan untuk membantu dalam menganalisis tentang permasalahan yang akan diteliti. Keterkaitan antara variabel bebas seperti Upah (X_1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_2) dan Investasi PMDN (X_3) terhadap variabel terikat seperti Penyerapan Tenaga Kerja (Y). Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori yang sudah dijelaskan dapat dirumuskan kerangka.



Gambar 2.3 kerangka konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, (Sugiyono, 2007:93). Berdasarkan tujuan diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah :

- a. H_1 : Upah berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

Menurut Gilarso dalam Alghofari (2010:49), balas karya untuk factor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honor, uang lembur, tunjangan, dsb). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh).

Penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2002) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah, Output, dan Variabel dummy perubahan teknologi terhadap Jumlah tenaga yang terserap. Penelitian ini berjudul “Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja”. Penelitian ini dilakukan dengan metode data panel dan jenis data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara signifikan upah lebih besar berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja dan Output signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

- b. H_2 : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang diterima adalah upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam perhitungan PDRB kecuali balas jasa faktor produksi termasuk komponen penyusutan dan pajak tak langsung netto. Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto.

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas dan Nenek (2009) dalam artikel yang berjudul: “Pengaruh PDRB, Upah Riil, dan Investasi Riil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta”. Penelitian dilakukan dengan metode *time series* dengan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa PDRB signifikan

berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan upah riil serta investasi riil signifikan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

c. H_3 : Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

Investasi adalah penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Azaini (2014) dalam artikel yang berjudul: “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Upah Minimum, Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja”. Penelitian dilakukan dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan investasi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja dan upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory* yaitu metode penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat (Singarimbun, 1995:45). Jenis penelitian eksplanatori merupakan jenis penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan, pola hubungan, dan besar hubungan antara dua variabel atau lebih, dalam hal ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh variabel upah minimum, PDRB dan Investasi PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah besarnya variabel upah, PDRB dan Investasi provinsi Jawa Timur serta banyaknya tenaga kerja di provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016 yang mencakup seluruh 38 kabupaten/kota.

3.1.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yakni data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya, yaitu data yang diperoleh dengan menata dan menyalin data yang telah dikumpulkan oleh instansi yang telah tersusun dan siap diolah. Sumber data penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data periode tahun 2010-2016 berupa data runtut waktu (*time series*).

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Regresi Data Panel

Data panel adalah data yang memiliki dimensi ruang dan waktu, yang merupakan penggabungan data *time series* dan *cross section*. Dengan kata lain data panel adalah data yang diperoleh dari cross section yang diobservasi berulang pada unit individu yang sama pada waktu yang berbeda. Dengan demikian akan

diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu (Gujarati, 2012: 238). Apabila setiap unit cross section memiliki jumlah observasi times series yang sama maka disebut sebagai balanced panel.

Tabel 3.1 Uji Pemilihan Model

No	Nama	H ₀	H ₁	Kesimpulan Model
1	Uji Chow (<i>Likelihood Ratio</i>)	Ditolak	Diterima	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)
2	Uji Hausman	Ditolak	Diterima	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)

Sumber: Data diolah 2018

Terdapat tiga tehnik pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisis panel data yaitu (Mirza, 2012:27):

1. Pendekatan Model Pooled Least Square (*Common Effect*). Model ini dikenal dengan estimasi *Common Effect* yaitu tehnik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data time series dan data cross section. Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Dalam pendekatan ini hanya mengasumsikan bahwa perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya.
2. Pendekatan Model Efek Tetap (*Fixed Effect*). Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka yang dikenal dengan sebuta model efek tetap atau *Least Square Dummy Variabel* atau disebut juga *Covariance Model*. Pada metode ini estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dan dengan pembobot (*Cross-Section Weight*) atau *General Least Square* (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross-section*. Penggunaan model ini tepat

untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam mengintreprestasi data. Pemilihan model *Common Effect* dan *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan pengujian *Likelihood Test Ratio* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat diambil keputusan menggunakan *Fixed Effect Model*.

3. Pendekatan Model Efek Acak (*Random Effect*). Model data dengan pendekatan ini yaitu model efek acak yang parameter-parameternya berbeda antar daerah maupun antar waktu yang dimasukkan ke dalam error. Dengan menggunakan model pendekatan ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Keputusan menggunakan model efek tetap maupun efek acak dapat ditentukan dengan menggunakan uji *Hausman* dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Keputusan menggunakan model efek tetap atau pun acak ditentukan dengan menggunakan uji Hausman dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat digunakan metode *Fixed Effect*, namun apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*

Panel persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

di mana N adalah banyaknya data *cross-section*. Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

di mana T adalah banyaknya data *time-series*. Mengingat data panel merupakan

gabungan dari time-series dan cross-section, maka model dapat ditulis dengan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Dimana:

- Y = Penyerapan tenaga kerja (dalam ribuan jiwa)
- X1 = Upah (Rupiah)
- X2 = PDRB (Rupiah)
- X3 = Investasi (Rupiah)
- β_0 = Konstanta (besarnya Y apabila X1, X2, X3 dianggap konstan)
- β_1 = Koefisiensi Regresi Upah
- β_2 = Koefisiensi Regresi PDRB
- β_3 = Koefisiensi Regresi Investasi
- e = Variabel pengganggu
- i = kabupaten/kota di Jawa Timur
- t = waktu (tahun)

Regresi dengan data panel, secara umum mengakibatkan adanya kesulitan dalam spesifikasi model. Residualnya akan mempunyai tiga kemungkinan yaitu *residual time series*, *cross section* maupun gabungan keduanya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan panel data. Penaksiran model data panel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *fixed effect* dan pendekatan *random effect* (Gujarati, 2012: 214).

3.3 Pemilihan Metode

1) Uji Chow

Pengujian yang dilakukan untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan *coomon effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan Uji Chow.

Hipotesis yang digunakan adalah :

Ho : *coomon effect*

Ho : *fixed effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol (Ho) adalah apabila nilai probabilitas $F < \alpha$ (0,05)

2) Uji Hausman

Pengujian untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan *random effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan uji *hausman*. Hipotesis yang digunakan dalam *hausman test* adalah sebagai berikut :

Ho : *Random Effect*

Ho : *Fixed Effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol (Ho) adalah apabila nilai probabilitas $F < \alpha$ (0,05).

3.4 Asumsi Klasik

3.4.1 Uji Normalitas

Salah satu asumsi yang sering digunakan dalam analisis runtun waktu adalah asumsi data mengikuti distribusi normal (Rosadi, 2011:125). Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah faktor pengganggu telah berdistribusi normal atau tidak. Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang akan didapatkan mempunyai distribusi normal. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Salah satunya melalui uji yang dikembangkan oleh Jarque-Bera (J-B). Untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak dengan cara membandingkan Jarque-Bera X^2 , apabila nilai J-B $< X^2$ tabel maka residualnya berdistribusi normal. Selanjutnya, dengan cara membandingkan probabilitas JB-nya yaitu apabila nilai probabilitas JB $> \alpha$ (5%) maka residualnya berdistribusi normal (Gujarati, 2012:240).

3.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolinieritas jika ada fungsi linier yang sempurna pada beberapa atau semua variabel independen dalam fungsi linier dan hasilnya sulit didapatkan pengaruh antara independen dan

dependen variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas atau korelasi tinggi antarvariabel independen dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2012: 230).

3.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama, jika kesalahan pengganggu tidak memiliki varian yang sama, maka terjadi heterokedastisitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *uji gletser* dengan cara meregresikan variabel bebas dengan residual kuadrat sebagai variabel variabel terikat. Suatu regresi menyatakan terdapat gejala heterokedastisitas bila variabel bebasnya memiliki hubungan yang sempurna terdapat residual. Bila hasil analisis menunjukkan bahwa regresi variabel bebas terdapat residual tidak signifikan (uji t dan uji f) maka regresi tersebut terhindar dari heterokedastisitas (Supranto, 1995:257).

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Jika t Probabilitas \leq *level of significance* ($\alpha = 5\%$), maka terdapat Heteroskedastisitas;
2. Jika t probabilitas $>$ *level of significance* ($\alpha = 5\%$), maka tidak terdapat Heteroskedastisitas.

3.5 Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis, akan dilakukan beberapa uji antara lain uji uji koefisien regresi secara keseluruhan (uji-F), koefisien regresi secara individual (uji-t), uji koefisien determinasi (R^2).

1) Uji Statistik F (F-Test)

Untuk menguji secara bersama-sama keseluruhan variabel bebas upah, PDRB dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja maka digunakan uji F dengan cara:

1. Menentukan hipotesis yang akan diuji (H_0 dan H_a).
2. Menentukan *level of sigificance* (α) tertentu.
3. Menentukan kriteria pengujian dengan membandingkan nilai F-tabel dan F-hitung.
4. Menarik kesimpulan

Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel, dimana nilai F hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (K-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Keterangan :

- F : Pengujian secara bersama-sama
 R^2 : Koefisien determinasi berganda
 k : Banyaknya variabel
 n : Banyaknya observasi (sampel)
 k-1 : Derajat bebas pembilang
 n-k : Derajat bebas penyebut

Rumusan Hipotesa:

- 1 $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, artinya secara bersama-sama variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
- 2 $H_i : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, artinya secara bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujian:

- 1 Jika probabilitas $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
- 2 Jika probabilitas $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa seluruh variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

2) Uji t (t-test)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel upah minimum, PDRB dan Investasi terhadap variabel jumlah penyerapan tenaga kerja dengan rumus sebagai berikut (Supranto, 1995:196)

$$t_{\text{hitung}} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Keterangan: t : t hitung (pengujian secara parsial)

b_i : koefisien regresi linier berganda

S_{b_i} : standar deviasi

Rumusan Hipotesis:

- 1 $H_0 : b_i = 0$, artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2 $H_1 : b_i \neq 0$, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujian :

1. Jika probabilitas $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka variabel upah minimum, PDRB dan Investasi secara parsial ada berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.
2. Jika probabilitas $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, H_0 diterima dan H_1 ditolak, maka variabel jumlah upah minimum, PDRB dan Investasi secara parsial tiada berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

3) Uji Koefisien Determinasi Berganda (Uji R^2)

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas yaitu upah minimum, PDRB dan investasi terhadap variabel terikat yaitu penyerapan tenaga kerja dalam persamaan regresi digunakan analisis koefisien determinasi dengan formula sebagai berikut: (Supranto, 1995:258-260).

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} + \frac{ESS}{TSS}$$

$$R^2 = \frac{b_1 \sum Y_1 X_1 + b_2 \sum Y_2 X_2 + b_3 \sum Y_3 X_3}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien regresi

ESS = jumlah kuadrat regresi/*Explained of squares*($b_1\sum Y_1X_1 + b_2\sum Y_2X_2$)

RSS = jumlah kuadrat kesalahan regresi/ *Total sum of squares* ($\sum Y_1^2$)

TSS = jumlah kuadrat total (ESS+RSS)

Batas nilai R^2 adalah : $0 < R^2 < 1$ (Supranto, 1995 : 219)

Kriteria pengujian:

1. Jika nilai R^2 adalah mendekati 1, maka pengaruh upah minimum, PDRB dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja sempurna dan positif, artinya apabila ada kenaikan dalam variabel upah, PDRB dan Investasi akan menyebabkan kenaikan variabel jumlah penyerapan tenaga kerja.
2. Jika nilai R^2 adalah mendekati 0, maka pengaruh upah minimum, PDRB dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah lemah atau tidak ada hubungan, artinya apabila ada kenaikan atau penurunan pada variabel upah, PDRB dan Investasi tidak akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan pada variabel jumlah penyerapan tenaga kerja.
3. Jika nilai R^2 adalah mendekati -1, maka pengaruh variabel upah minimum, PDRB dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja sempurna dan negatif, artinya apabila ada kenaikan upah minimum, PDRB dan Investasi menyebabkan penurunan pada jumlah penyerapan tenaga kerja.

3.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang tidak tepat dan meluasnya permasalahan, maka terdapat batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016 yang dinyatakan dalam satuan juta jiwa.
2. Upah adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten/Kota Jawa Timur periode 2010-2016 telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan semua unit produksi suatu wilayah di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016 yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.
4. Investasi adalah keseluruhan nilai investasi yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan menggunakan modal dalam negeri di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016 Yang diukur dalam satuan juta rupiah.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2010-2016 dengan variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Investasi PMDN terhadap Jumlah Tenaga Kerja. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan:

1. Hasil pengujian regresi data panel atas upah minimum terhadap jumlah tenaga kerja di provinsi Jawa Timur menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Maka dengan meningkatnya upah minimum di Jawa Timur yang dinaikkan para pengusaha akan mengupayakan untuk dapat meningkatkan atau menambah jumlah dari unit usahanya sehingga diharapkan dengan adanya penambahan dari jumlah unit usaha, pengusaha juga akan menambah jumlah dari tenaga kerjanya.
2. Hasil pengujian regresi data panel atas PDRB terhadap jumlah tenaga kerja di provinsi Jawa Timur menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat di Provinsi Jawa Timur peningkatan PDRB diakibatkan karena adanya kontribusi dari lapangan usaha seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, sektor jasa-jasa. Banyaknya sektor-sektor tentu akan mempengaruhi jumlah output yang dikeluarkan. Jumlah output yang dikeluarkan dari berbagai sektor tersebut akan mengakibatkan penambahan jumlah tenaga kerja karena untuk menghasilkan output yang baik tentu diperlukan tenaga kerja.
3. Hasil pengujian regresi data panel atas Investasi PMDN terhadap jumlah tenaga kerja di provinsi Jawa Timur menunjukkan hubungan positif dan tidak signifikan. Hal ini disebabkan kegiatan investasi masih banyak berupa non bangunan, yang cenderung bersifat *maintenance* mesin yang dilakukan secara reguler ataupun peremajaan mesin lama tanpa menambah kapasitas produksi. akibat penggunaan mesin tersebut maka penyerapan tenaga kerja menjadi rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dan dapat dikaitkan dengan kesimpulan yang diperoleh, maka yang perlu disarankan dari hasil penelitian berikut adalah:

1. Hendaknya pemerintah daerah menyusun kebijakan pengupahan sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi serta meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga kebijakan pengupahan akan berorientasi kepada kepentingan seluruh pihak..
2. Pemerintah daerah hendaknya mendorong dan memacu peningkatan produk domestik regional bruto disetiap sektor ekonomi sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat.
3. Pemerintah daerah hendaknya mendorong investasi pada sektor-sektor yang padat karya dan lebih selektif dalam memberikan ijin bagi pemilik modal terkait dengan proyek-proyek yang akan direalisasikan sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, F. 2010. *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2017. Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi kelima*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
- Azaini, R. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Malang Tahun 1998-2012. Jurnal Ilmiah*. 3 (2): 7-15.
- Badan Pusat statistik. 2013. *Kabupaten Jember Dalam Angka*. Jember: BPS Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Investasi*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Jumlah Penduduk*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Upah Minimum Kota*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur. Data.go.id.
- Basuki, T dan Immamudin, Y. 2016. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.
- Deliarnov. 1995. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- Dewi, I. 2013. Pengaruh Investasi dan Tingkat Upah Terhadap Kesempatan Kerja di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 1 (3): 1-8.
- Dimas dan Nenek, W. 2009. Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 16 (1): 2-8.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D. N. 2003. *Ekonometri Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D. N. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.

- Intradewa, G. A dan Ketut, S. N. 2015. *Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali Periode Tahun 1994-2013*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 4 (8): 12-20.
- Irwan, A. 2010. *Analisis Pergeseran Sektor-Sektor Ekonomi dan Penetapan Sektor Basis Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Takalar*. *Jurnal Ekonomi*. 2 (1): 1-7.
- Jhingan, M. L. 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khairani, I. 2010. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Tenaga Kerja Wanita di Kota Binjai. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*. 2 (1): 1-7.
- Kuncoro, H. 2002. Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 7 (1): 45-56.
- Kurniawan, A. P dan Herniwati, R. H. 2013. *Analisis Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kabupaten Purworejo*. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas diponogoro.
- Lavianty, M. E. 2016. *Pengaruh PDRB, Investasi, Upah, dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2008-2013*. *Skripsi*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.
- Listyaningsih, W. D. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga kerja Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah*. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mahyus, E. 2015. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mankiw, N. G. 2007. *Makro ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Marselina, T. R. 2016. *Pengaruh investasi, unit usaha dan tenaga kerja terhadap nilai produksi sektor industri di Provinsi Jambi*. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. 5 (1): 1-12.
- Mirza, S. 2012. *Fisika Dasar*. Yogyakarta: UGM.
- Mulyadi, S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Pangastuti, Y. 2015. *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. Jurnal Ekonomi.* 2 (1): 1-9.
- Prakoso, S. B. 2015. *Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Investasi dan Upah Minimum Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah.* 1 (2): 1-10.
- Priyono, E. 2011. Kebijakan Pengupahan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis dan Usulan Perubahan Menuju Upah Layak. *Jurnal Analisis Sosial.* 7 (1): 10-18.
- Rosadi, D. 2012. *Analisis Ekonometrika dan Runtun Waktu Terapan dengan Eviews.* Yogyakarta: Andioffset.
- Rosyidi, S. 1998. *Pengantar Teori Ekonomi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, P. J. 2002. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia: Edisi Kedua.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Singarimbun, M. 1995. *Metode Penelitian Survey.* Jakarta: LP3ES.
- Subagiarta, I Wayan. 2012. *Sumber Daya Manusia.* Jember: FE UNEJ.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. 2000. *Makro Ekonomi Modern.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2006. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2008. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2013. *Ekonomi Pembangunan.* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Bima Grafika.
- Sumanto. 2006. *Pengembangan Kreativitas Seni Rupa Anak Sekolah Dasar.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sumarsono, S. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan.* Jakarta: Graha Ilmu.
- Supranto, J. 1995. *Ekonometrik.* Jakarta: Universitas Indonesia.

- Tambunsaribu, R. Y. 2013. *Analisis Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja, Upah Riil dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan, R. 2007. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.
- Utami, B. T. 2009. *Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto, Angkatan Kerja dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember. Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Utari, T. 2018. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Investasi dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kesempatan Kerja di Sumatera Utara. Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Wara, D. M. 2016. *Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum dan Investasi Terhadap TPAK Pada 38 Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. Jurnal Ilmiah*. 3 (2): 5-10.
- Wasilaputri, F. R. 2016. *Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

LAMPIRAN A1

Data Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Jawa Timur Tahun 2010-2016

Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk bekerja (jiwa)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pacitan	347306	345898	339352	339681	345270	349759	349280
Ponorogo	474044	446382	483962	474183	478260	467372	487811
Trenggalek	379109	396804	399772	397668	382330	394587	378767
Tulungagung	524294	527516	536567	536447	551480	525867	524884
Blitar	580193	569840	618580	603443	587403	580982	619050
Kediri	734643	700249	769257	754316	747065	760682	826827
Malang	1199542	1188413	1278427	1242884	1212028	1228309	1257912
Lumajang	472049	466105	501928	505090	500104	518184	500530
Jember	1130595	1172949	1106262	1123266	1103779	1117132	1215130
Banyuwangi	793846	733971	851945	838622	780835	871029	878895
Bondowoso	398735	377315	395928	386153	400655	417437	435036
Situbondo	349306	331391	346240	345122	334065	351821	377294
Probolinggo	591038	596345	624454	598256	592540	586555	573832
Pasuruan	764381	784210	766766	795706	806291	762757	778563
Sidoarjo	917622	957899	957887	996960	1028243	1015208	1021884
Mojokerto	518877	488795	539139	528416	532294	552002	589641
Jombang	578789	557227	570047	560677	577679	607856	630238
Nganjuk	485507	480019	508859	523384	513031	506132	487899
Madiun	328262	340017	349831	349178	350522	327148	338495
Magetan	372784	338847	342553	342882	328845	331493	375773
Ngawi	425885	397707	410090	448634	412831	413822	411125
Bojonegoro	608954	577451	633960	654915	608174	608181	665600
Taban	582059	552400	556649	590812	548541	584743	631783
Lamongan	575822	544619	592097	612448	585311	607096	612030
Gresik	541720	535346	532304	591514	562559	577049	632529
Bangkalan	407091	416538	444345	442663	446517	457282	460988
Sampang	436256	460147	482807	447743	496322	447470	465897
Pamekasan	422583	441214	461339	469849	459046	425333	445268
Sumenep	588332	636110	629881	613293	616145	580887	618330
Kota Kediri	124436	123522	129938	125726	134293	130564	137918
Kota Blitar	61298	62730	63854	64373	65402	72650	74752
Kota Malang	358415	402875	386483	401435	393050	377329	411042
Kota Probolinggo	73981	99075	106176	101550	107668	104953	114782
Kota Pasuruan	76405	86364	91303	92850	91212	92058	94873
Kota Mojokerto	56836	57101	61407	62123	61771	63806	64805
Kota Madiun	79297	79897	78855	84179	80613	86092	90415
Kota Surabaya	1245542	1230165	1361648	1404445	1380157	1365180	1406358
Kota Batu	92274	101413	100364	103024	104177	100970	112984

Sumber: BPS Jawa Timur, 2015 (data diolah)

LAMPIRAN A2

Data Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2010-2016

Wilayah	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (Rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pacitan	630.000	705.000	750.000	887.250	1.000.000	1.150.000	1.283.000
Ponorogo	635.000	705.000	745.000	924.000	1.000.000	1.150.000	1.283.000
Trenggalek	635.000	710.000	760.000	903.900	1.000.000	1.150.000	1.283.000
Tulungagung	641.000	720.000	815.000	1.007.900	1.107.000	1.273.050	1.420.000
Blitar	655.000	750.000	815.000	946.850	1.000.000	1.260.000	1.405.000
Kediri	837.500	934.500	999.000	1.089.950	1.135.000	1.305.250	1.456.000
Malang	1.000.005	1.077.600	1.130.000	1.343.700	1.635.000	1.962.000	2.188.000
Lumajang	688.000	740.700	825.391	1.011.950	1.120.000	1.288.000	1.437.000
Jember	830.000	875.000	920.000	1.091.950	1.270.000	1.460.500	1.629.000
Banyuwangi	824.000	865.000	915.000	1.086.400	1.240.000	1.426.000	1.599.000
Bondowoso	668.000	735.000	800.000	946.000	1.105.000	1.270.750	1.417.000
Situbondo	600.000	733.000	802.500	1.048.000	1.071.000	1.209.900	1.374.000
Probolinggo	744.000	814.000	888.500	1.103.200	1.353.750	1.556.800	1.603.000
Pasuruan	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.195.800	2.190.000	2.700.000	3.037.000
Sidoarjo	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	2.190.000	2.705.000	3.040.000
Mojokerto	1.009.150	1.105.000	1.234.000	1.700.000	2.050.000	2.695.000	3.030.000
Jombang	790.000	865.500	978.200	1.200.000	1.500.000	1.725.000	1.924.000
Nganjuk	650.000	710.000	785.000	960.200	1.131.000	1.265.000	1.411.000
Madiun	660.000	720.000	775.000	953.000	1.045.000	1.196.000	1.340.000
Magetan	650.000	705.000	750.000	866.250	1.000.000	1.150.000	1.283.000
Ngawi	685.000	725.000	780.000	900.000	1.040.000	1.150.000	1.334.000
Bojonegoro	825.000	870.000	930.000	1.029.500	1.140.000	1.311.000	1.462.000
Tuban	870.000	935.000	970.000	1.144.400	1.370.000	1.575.500	1.757.000
Lamongan	875.000	900.000	950.000	1.075.700	1.220.000	1.410.000	1.573.000
Gresik	1.010.400	1.133.000	1.257.000	1.740.000	2.195.000	2.707.500	3.042.500
Bangkalan	755.000	850.000	885.000	983.800	1.102.000	1.267.300	1.414.000
Sampang	690.000	725.000	800.000	1.104.600	1.120.000	1.231.650	1.387.000
Pamekasan	900.000	925.000	975.000	1.059.600	1.090.000	1.201.750	1.350.000
Sumenep	730.000	785.000	825.000	965.000	1.090.000	1.253.500	1.398.000
Kota Kediri	906.000	975.000	1.037.500	1.128.400	1.165.000	1.339.750	1.494.000
Kota Blitar	663.000	737.000	815.000	924.800	1.000.000	1.243.200	1.394.000
Kota Malang	1.006.263	1.079.887	1.132.000	1.340.300	1.387.000	1.882.250	2.099.000
Kota Probolinggo	741.000	810.500	885.000	1.198.600	1.250.000	1.437.500	1.603.000
Kota Pasuruan	865.000	926.000	1.252.000	1.720.000	1.360.000	1.575.000	1.757.000
Kota Mojokerto	805.000	835.000	875.000	1.040.000	1.250.000	1.437.500	1.603.000
Kota Madiun	685.000	745.000	812.500	953.000	1.066.000	1.250.000	1.394.000
Kota Surabaya	1.031.500	1.115.000	1.257.000	1.740.000	2.200.000	2.710.000	3.045.000
Kota Batu	989.000	1.050.000	1.100.215	1.268.000	1.380.037	1.877.000	2.026.000

Sumber: BPS Jawa Timur, 2016 (data diolah)

LAMPIRAN A3

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2016

Wilayah	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Konstan 2010 (Miliar Rp)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pacitan	6.817,40	7.246,20	7.705,00	8.157,60	8.582,20	9.019,50	9.489,1
Ponorogo	8.961,50	9.472,20	10.038,40	10.554,50	11.104,10	11.686,20	12.305,7
Trenggalek	7.962,10	8.435,20	8.959,50	9.496,70	9.998,40	10.500,80	11.026,5
Tulungagung	16.776,30	17.845,20	18.999,00	20.164,30	21.265,20	22.326,60	23.446,4
Blitar	16.213,90	17.093,90	18.054,50	18.967,30	19.920,20	20.925,50	21.991,4
Kediri	18.254,50	19.354,90	20.538,30	21.733,50	22.889,30	24.005,50	25.211,9
Malang	41.342,90	44.091,30	47.076,00	49.571,70	52.549,60	55.316,30	58.247,3
Lumajang	14.260,10	15.144,40	16.053,40	16.949,60	17.852,10	18.677,70	19.555,2
Jember	33.375,50	35.208,20	37.262,00	39.519,20	41.968,80	44.204,10	46.526,6
Banyuwangi	32.463,80	34.720,40	37.235,70	39.733,60	41.997,60	44.523,50	46.924,6
Bondowoso	8.515,90	9.033,00	9.583,40	10.140,10	10.651,90	11.178,70	11.735,6
Situbondo	8.471,40	8.927,10	9.411,60	9.993,80	10.572,40	11.086,50	11.640,8
Probolinggo	15.028,10	15.912,50	16.936,80	17.808,90	18.681,30	19.570,40	20.504,1
Pasuruan	61.178,30	65.271,60	70.167,10	75.044,00	80.105,30	84.412,00	89.011,2
Sidoarjo	81.472,70	87.212,40	93.543,90	99.992,50	106.435,50	112.012,50	118.179,2
Mojokerto	34.147,10	36.405,80	39.047,30	41.608,40	44.292,10	46.792,80	49.321,9
Jombang	17.350,80	18.385,00	19.514,80	20.672,30	21.793,20	22.960,20	24.199,1
Nganjuk	11.405,40	12.061,20	12.767,00	13.456,00	14.142,60	14.875,70	15.661,8
Madiun	8.119,70	8.608,70	9.135,70	9.654,10	10.169,70	10.705,10	11.268,9
Magetan	8.277,80	8.744,80	9.251,20	9.792,60	10.292,40	10.824,10	11.398,1
Ngawi	8.456,70	8.973,30	9.568,20	10.094,00	10.681,00	11.224,00	11.807,6
Bojonegoro	33.291,90	36.751,00	38.136,10	39.039,40	39.934,40	46.892,80	57.187,4
Tuban	28.017,90	29.934,30	31.816,30	33.678,80	35.519,40	37.254,70	39.081,8
Lamongan	16.275,20	17.360,50	18.562,70	19.848,80	21.100,10	22.316,80	23.623,8
Gresik	59.068,60	62.898,70	67.248,80	71.314,20	76.336,70	81.359,40	85.835,1
Bangkalan	15.881,40	16.406,50	16.173,70	16.204,00	17.369,80	16.907,10	17.018,6
Sampang	10.064	10.315,30	10.910,90	11.623,80	11.632,90	11.874,50	12.606,8
Pamekasan	6.994,20	7.429,40	7.894,00	8.375,20	8.846,20	9.317,20	9.815,8
Sumenep	15.136,50	16.064,80	17.665,00	20.218,10	21.476,80	21.750,50	22.311,7
Kota Kediri	57.550,60	60.020,10	63.185,10	65.408,80	69.232,90	72.945,50	76.959,4
Kota Blitar	2.855	3.038,40	3.236,60	3.446,80	3.649,50	3.857,00	4.079,3
Kota Malang	31.377,30	33.273,70	35.355,70	37.547,70	39.724,30	41.951,60	44.303,9
Kota Probolinggo	4.921,30	5.213,90	5.552,10	5.911,30	6.261,90	6.629,10	7.018,3
Kota Pasuruan	3.585,40	3.810,70	4.051,20	4.315,10	4.561,10	4.813,30	5.076,4
Kota Mojokerto	2.987,20	3.165,60	3.358,40	3.566,70	3.774,50	3.991,10	4.221,5
Kota Madiun	6.081,20	6.494,40	6.937,70	7.470,70	7.965,50	8.455,40	8.954,7
Kota Surabaya	231.204,70	247.686,60	265.892,10	286.050,70	305.957,30	324.227,80	343.652,6
Kota Batu	6.504,40	6.968,00	7.473,60	8.018,60	8.572,10	9.145,90	9.750,9

Sumber: BPS Jawa Timur, 2016 (data diolah)

LAMPIRAN A4

Data Investasi Penanam Modal Dalam Negri (PMDN) Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2016

Wilayah	Investasi PMDN (Juta Rp)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pacitan	710.117	849.358	994.300	1.039.251	1.061.181	933.375	802.360
Ponorogo	448.540	163.664	222.319	397.422	472.395	474.466	644.965
Trenggalek	119.119	110.092	75.219	104.270	117.539	138.284	106.388
Tulungagung	195.570	310.436	353.415	539.769	492.992	529.325	629.498
Blitar	101.620	155.670	205.359	248.741	257.977	317.964	348.752
Kediri	264.749	299.309	1.834.970	415.356	394.983	417.226	528.068
Malang	469.550	594.260	1.003.822	1.409.442	1.484.227	1.552.680	1.639.182
Lumajang	214.804	167.647	156.131	223.813	353.646	472.239	642.182
Jember	2.355.728	520.548	619.639	652.370	638.789	745.221	896.759
Banyuwangi	370.589	325.779	321.177	475.709	717.580	1.184.476	1.712.261
Bondowoso	113.739	87.177	60.584	160.792	242.065	206.576	190.475
Situbondo	34.586	63.259	90.446	104.665	115.339	105.563	109.447
Probolinggo	235.738	386.103	159.101	132.942	158.797	432.743	349.987
Pasuruan	292.262	423.498	790.298	1.058.652	1.340.009	384.332	534.397
Sidoarjo	1.971.209	2.695.914	3.186.341	3.892.343	4.226.924	4.901.677	5.438.501
Mojokerto	563.209	762.263	1.026.828	1.380.705	1.433.913	1.248.887	1.855.998
Jombang	88.375	167.071	261.734	342.393	385.773	475.147	779.883
Nganjuk	85.299	130.818	132.173	167.029	176.010	198.556	242.364
Madiun	184.594	194.047	172.582	182.447	428.401	402.285	581.905
Magetan	161.741	117.219	997.079	1.042.458	168.716	180.938	201.751
Ngawi	132.241	136.639	108.718	171.303	220.420	248.449	927.870
Bojonegoro	448.540	265.462	221.115	397.652	400.272	618.990	686.486
Tuban	319.743	651.914	835.271	940.856	1.880.309	2.030.868	1.787.503
Lamongan	190.921	265.676	361.450	483.831	545.329	595.416	604.423
Gresik	1.815.702	2.192.036	2.682.085	3.306.614	5.155.658	7.070.763	10.029.496
Bangkalan	19.488	46.965	59.966	149.453	177.323	250.420	284.421
Sampang	107.633	81.524	36.290	54.557	72.565	77.887	110.874
Pamekasan	111.605	96.746	106.451	135.806	177.487	272.949	314.271
Sumenep	159.380	131.261	137.569	134.794	146.201	173.040	234.534
Kota Kediri	197.058	211.426	244.625	263.112	242.589	336.965	338.772
Kota Blitar	32.885	58.982	64.445	64.991	79.293	110.216	116.617
Kota Malang	592.363	785.552	1.004.392	1.482.429	1.647.076	1.781.167	1.639.182
Kota Probolinggo	560.117	642.103	674.721	612.961	545.919	432.743	349.987
Kota Pasuruan	117.337	71.951	110.208	174.300	222.647	384.332	534.397
Kota Mojokerto	193.878	194.452	1.026.828	210.184	268.973	467.098	401.140
Kota Madiun	161.749	147.285	154.881	168.621	428.401	402.285	272.598
Kota Surabaya	8.466.985	11.121.576	15.438.042	21.111.515	23.543.021	25.124.041	29.177.402
Kota Batu	18.280	76.163	103.450	166.234	186.700	220.343	207.274

Sumber: Bank Indonesia, 2016 (data diolah)

LAMPIRAN B**Hasil Analisis Regresi Data Panel *Fixed Effect Model***

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 09/26/18 Time: 11:24

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	464420.3	10271.86	45.21287	0.0000
UMK	5.142564	2.487096	2.067698	0.0398
PDRB	1.076435	0.398841	2.698908	0.0075
INVESTASI	0.003435	0.002126	1.615239	0.1077

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995929	Mean dependent var	507675.4
Adjusted R-squared	0.995205	S.D. dependent var	306096.0
S.E. of regression	21196.04	Akaike info criterion	22.90189
Sum squared resid	1.01E+11	Schwarz criterion	23.45423
Log likelihood	-3004.952	Hannan-Quinn criter.	23.12379
F-statistic	1376.005	Durbin-Watson stat	1.968778
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN C**Hasil Uji Chow (*Chow-Test*)**

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	816.694466	(37,225)	0.0000
Cross-section Chi-square	1305.395252	37	0.0000

Hasil Uji Hausman (*Hausman-Test*)

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

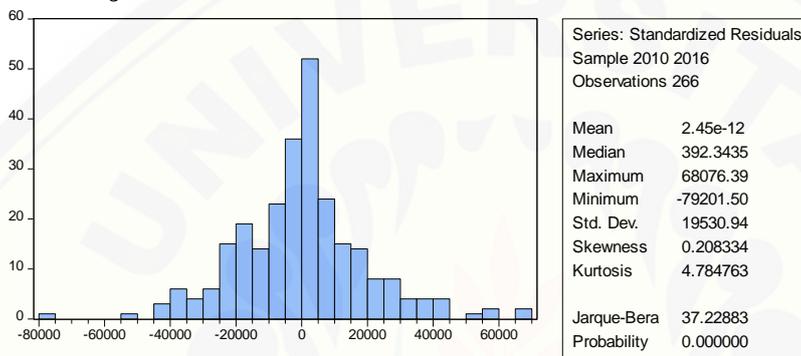
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.745480	3	0.0020

LAMPIRAN D

Hasil Uji Multikolinearitas

	PTK	UMK	PDRB	INVESTASI
PTK	1.000000	0.211039	0.637530	0.498137
UMK	0.211039	1.000000	0.330040	0.320492
PDRB	0.637530	0.330040	1.000000	0.713240
INVESTASI	0.498137	0.320492	0.713240	1.000000

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Heterokedasitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/26/18 Time: 11:30
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5690.705	5587.134	1.018537	0.3095
UMK	2.031202	1.352797	1.501484	0.1346
PDRB	0.212677	0.216940	0.980348	0.3280
INVESTASI	-0.001069	0.001157	-0.924528	0.3562

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.394588	Mean dependent var	13939.58
Adjusted R-squared	0.286959	S.D. dependent var	13653.29
S.E. of regression	11529.08	Akaike info criterion	21.68401
Sum squared resid	2.99E+10	Schwarz criterion	22.23635
Log likelihood	-2842.973	Hannan-Quinn criter.	21.90591
F-statistic	3.666187	Durbin-Watson stat	2.423651
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN E

Hasil Estimasi Individual Effect di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016

No	CROSSID	Effect
1	Kabupaten Pacitan	-133705.6
2	Kabupaten Ponorogo	-7408.083
3	Kabupaten Trenggalek	-95474.96
4	Kabupaten Tulungagung	41255.09
5	Kabupaten Blitar	104291.3
6	Kabupaten Kediri	261755.9
7	Kabupaten Malang	700665.7
8	Kabupaten Lumajang	6989.016
9	Kabupaten Jember	624170.1
10	Kabupaten Banyuwangi	306928.5
11	Kabupaten Bondowoso	-78805.64
12	Kabupaten Situbondo	-132380.5
13	Kabupaten Probolinggo	105068.0
14	Kabupaten Pasuruan	223890.9
15	Kabupaten Sidoarjo	390738.3
16	Kabupaten Mojokerto	13501.52
17	Kabupaten Jombang	89916.31
18	Kabupaten Nganjuk	16679.40
19	Kabupaten Madiun	-139292.3
20	Kabupaten Magetan	-132586.8
21	Kabupaten Ngawi	-63011.92
22	Kabupaten Bojonegoro	107700.5
23	Kabupaten Tuban	68404.69
24	Kabupaten Lamongan	98227.42
25	Kabupaten Gresik	204.8452
26	Kabupaten Bangkalan	-48237.29
27	Kabupaten Sampang	-19381.13
28	Kabupaten Pamekasan	-32578.06
29	Kabupaten Sumenep	121554.5
30	Kota Kediri	-412399.2
31	Kota Blitar	-406677.9
32	Kota Malang	-126002.9
33	Kota Probolinggo	-375388.2
34	Kota Pasuruan	-386129.7
35	Kota Mojokerto	-413421.9
36	Kota Madiun	-394742.3
37	Kota Surabaya	493874.9
38	Kota Batu	-378192.5